



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR



PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Robbi Rizki Samboja

NIM: 2304321040

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR



PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada
Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Politeknik Negeri Jakarta

Disusun Oleh:

Robbi Rizki Samboja

NIM: 2304321040

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir / Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. pendapat ,gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk dengan etika ilmiah.

Nama : Robbi Rizki Samboja
NIM : 2304321040
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Depok, 25 Juni 2026

POLITEK
NEGERI
JAKARTA



Robbi Rizki Samboja
NIM. 2304321040



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Robbi Rizki Samboja
NIM : 2304321040
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Judul LTA : Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Rika Lisnawati, S.E., M.Tr.E.

NIP. 19970432024062001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Diketahui Oleh:

KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.

NIP : 199004252024062002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

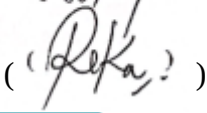
LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Robbi Rizki Samboja
NIM : 2304321040
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Judul LTA : Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 2025
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Kementerian Kehutanan.

Telah Berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Novitasari, S.Pd., M.Ak. ()
Anggota Penguji : Rika Lisnawati, S.E., M. Tr.E. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal :

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si.
NIP. 197009131999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkat Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN” dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan Magang serta menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan semester VI dan mengikuti ujian sidang Tugas Akhir.

Penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, praktikan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkaitan, yaitu:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., AK., CA., SAS., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M., selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Rika Lisnawati, S.E., M. Tr.E. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
5. Bu Amelia Dwi Tiya, S.T. selaku Mentor di Sekretariat Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.
6. Keluarga besar praktikan yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.
7. Seluruh sahabat-sahabat terdekat praktikan yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat.

Penulis Menyadari dalam penulisan Laporan Magang ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun saya harapkan guna menyempurnakan penulisan laporan ini.

Depok, 26 Juni 2026

(Robbi Rizki Samboja)

NIM. 2304321040



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robbi Rizki Samboja
NIM : 2304321040
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 20 Juni 2026

Yang Menyatakan

Robbi Rizki Samboja



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN

Robbi Rizki Samboja

Program Studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan, Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

E-mail: robbi.rizki.samboja.ak23@stu.pnj.ac.id

ABSTRAK

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen wajib laporan keuangan pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dilaksanakan melalui tujuh tahapan berurutan mulai dari penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran hingga kompilasi laporan konsolidasi eselon I menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Ditemukan lima kategori hambatan, yaitu selisih rekonsiliasi berulang, rigiditas rekonsiliasi kode akun hingga kode output program, keterbatasan validasi substansi belanja oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, keterbatasan kompetensi operator keuangan satuan kerja, serta ketidakselarasan jadwal reвью Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama bersumber dari kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga, bukan dari kelemahan sistem teknologi. Temuan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi celah implementasi yang dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, prosedur penyusunan, sistem akuntansi pemerintahan, hambatan pelaporan keuangan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

The Budget Realization Report (Laporan Realisasi Anggaran) is a mandatory component of government financial statements that serves as an accountability instrument for the use of state budget funds. This study aims to describe the procedures for preparing the 2025 Budget Realization Report and to identify the obstacles encountered at the Secretariat of the Directorate General of Forestry Law Enforcement, Ministry of Forestry. The method used is descriptive qualitative, employing interviews, direct observation, and documentation. The results show that the preparation of the Budget Realization Report is carried out through seven sequential stages, beginning with the determination of the Budget Implementation List (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) and concluding with the compilation of the consolidated echelon I report using the Instance-Level Financial Application System (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Five categories of obstacles were identified: recurring reconciliation discrepancies, the rigidity of account code reconciliation down to the program output code level, limited substantive expenditure validation by the State Treasury Service Office (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), limited competency of work-unit financial operators, and misalignment in the review schedule of the Inspectorate General. This study concludes that the primary obstacles stem from human resource capacity and inter-agency coordination rather than from weaknesses in technological systems. These findings contribute to identifying implementation gaps that may serve as a basis for improving financial governance within the Ministry of Forestry.

Keywords: Budget Realization Report, LRA preparation procedure, SAKTI, reconciliation, government accounting

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Manfaat Penulisan	3
1.4. Metode Penulisan	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Akuntansi Sektor Publik	6
2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	7
2.3 Laporan Keuangan Pemerintah	9
2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran	9
2.3.2 Laporan Operasional	9
2.3.3 Neraca	10
2.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
2.3.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	11
2.4 Laporan Realisasi Anggaran	12
2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	12
2.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	13
2.4.3 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran	13
2.4.4 Fungsi Laporan Realisasi Anggaran	15
2.4.5 Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran	16
2.5 Prosedur Penyusunan LRA	17
2.6 Sistem Aplikasi Keuangan Pemerintah (SAKTI)	20
2.7 Pengendalian Internal dan Akuntabilitas.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	23
3.1 Profil Instansi Kementerian Kehutanan	23
3.1.1 Visi Kementerian Kehutanan	24
3.1.2 Misi Kementerian Kehutanan	24
3.2 Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan.....	24
3.2.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Kehutanan	25
3.3 Profil Direktorat Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan	29

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.....	30
3.4.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Direktorat Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan	34
4.1.1 Unit yang Bertanggung Jawab	34
4.1.2 Pihak yang Terlibat	35
4.1.3 Aplikasi yang Digunakan.....	37
4.1.4 Dokumen yang Digunakan.....	38
4.1.5 Alur Umum Penyusunan LRA.....	43
4.2 Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan	44
4.2.1 Prosedur LRA secara Normatif.....	44
4.2.2 Prosedur Penyusunan LRA secara Aktual di Lapangan	45
4.2.3 Perbandingan Prosedur Normatif dengan Kondisi Aktual di Lapangan	47
4.2.4 Analisis Perbandingan: Impilkasi Gap Normatif-Aktual.....	49
4.3 Hambatan dalam Penyusunan LRA	51
4.3.1 Hambatan Teknis: Selisih Rekonsiliasi yang Bersifat Berulang.....	51
4.3.2 Hambatan Teknis: Rigiditas Rekonsiliasi hingga Level COA dan Kode Output Program.....	52
4.3.3 Hambatan Administratif: Keterbatasan Validasi Substansi Belanja oleh KPPN	53
4.3.4 Hambatan Sumber Daya Manusia: Keterbatasan Kompetensi Operator GL Satuan Kerja	55
4.3.5 Hambatan Koordinasi: Ketidakselarasan Jadwal Review Inspektorat Jenderal.....	56
4.3.6 Analisis Hambatan dalam Kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	57
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Unit yang Bertanggung Jawab dalam Penyusunan LRA.....	35
Tabel 4.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan LRA.....	36
Tabel 4.3 Aplikasi yang Digunakan dalam Penyusunan LRA.....	37
Tabel 4.4 Dokumen yang Digunakan dalam Penyusunan LRA	40
Tabel 4.5 Prosedur Normatif Penyusunan LRA dan Landasan Regulasinya	44
Tabel 4.6 Matriks Perbandingan Prosedur Normatif vs. Kondisi Aktual Penyusunan LRA di Setditjen Gakkum Kementerian Kehutanan 2025.....	48
Tabel 4.7 Matriks Komprehensif Hambatan Penyusunan LRA di Setditjen Gakkum Kementerian Kehutanan 2025.....	58





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 UI Awal Website SAKTI	20
Gambar 3.1 Logo Kementerian Kehutanan	23
Gambar 3.2 Visi Kementerian Kehutanan	24
Gambar 3.3 Stuktur Organisasi Kementerian Kehutanan	25
Gambar 3.4 Logo Ditjen Gakkum Kehutanan	29
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Ditjen Gakkum Kehutanan	30
Gambar 4.1 DIPA Setditjen Gakkum Tahun Anggaran 2025	42
Gambar 4.2 Bentuk Baku LRA	42





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	69
Lampiran 2 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing	72
Lampiran 3 Lembar Bimbingan Tugas Akhir	73
Lampiran 4 Surat Pernyataan Penggunaan Generative AI.....	75
Lampiran 5 Persetujuan Sidang Tugas Akhir	76





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di balik tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Biduri, 2018). Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi, efektivitas pengelolaan keuangan, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaporan (Primardiningtyas & Hidayat, 2025). Sebaliknya, apabila proses penyusunan laporan keuangan tidak dilakukan secara tepat atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dapat timbul berbagai risiko seperti kesalahan penyajian informasi keuangan, keterlambatan pelaporan, menurunnya tingkat keandalan laporan, risiko temuan dalam proses revidi dan audit, serta menurunnya kualitas akuntabilitas instansi secara keseluruhan (Utami & Berliani, 2024).

Salah satu komponen laporan keuangan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan PSAP Nomor 02 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, LRA menyandingkan anggaran yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang dilaksanakan, mulai dari pendapatan, belanja, sampai pembiayaan. Lebih dari sekadar laporan, LRA sekaligus jadi bukti pertanggungjawaban dan alat ukur seberapa baik kinerja keuangan instansi berjalan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2026). Penyusunan LRA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan instansi terhadap regulasi, melalui serangkaian tahapan mulai dari pencatatan transaksi, pengelompokan akun sesuai Bagan Akun Standar (BAS), rekonsiliasi data, hingga penyusunan laporan akhir (Rindengan & Kapojos, 2024).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam struktur Kementerian Kehutanan, Setditjen Gakkum menempati posisi sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Ditjen Gakkum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Setditjen Gakkum merumuskan sekaligus melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, dengan dukungan anggaran negara untuk kegiatan operasional, penegakan hukum, dan administratif. Dalam proses pelaporan, Setditjen Gakkum berperan ganda sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sekaligus Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang mengompilasi laporan keuangan dari 5 satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Setditjen Gakkum Kehutanan, penulis menemukan bahwa proses penyusunan LRA melibatkan koordinasi antara beberapa unit kerja dalam pengumpulan data transaksi keuangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala berupa keterlambatan pengiriman data dari unit terkait kepada petugas penyusun laporan. Selain itu, rekonsiliasi yang dilakukan tidak hanya mencakup kesesuaian nilai transaksi, tetapi juga meliputi verifikasi kode akun hingga ke tingkat Chart of Account (COA), kesesuaian kode output, serta kode program dan kegiatan suatu tuntutan yang jauh lebih kompleks dibandingkan satuan kerja pada umumnya. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, akurasi data yang disajikan, memicu koreksi dan retifikasi berulang, meningkatkan risiko temuan dalam proses reviu Inspektorat Jenderal maupun audit eksternal, serta pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi.

Penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah yang telah ada umumnya berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan secara kuantitatif, seperti kompetensi SDM, penerapan sistem informasi, dan pengendalian intern (Rahmawati dkk., 2022; Utami & Berliani, 2024). Kajian yang secara khusus menelaah prosedur penyusunan LRA secara aktual di lapangan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

termasuk perbandingannya dengan ketentuan normatif masih sangat terbatas. Kesenjangan literatur ini menjadikan penelitian ini relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini berkontribusi dengan menyajikan gambaran prosedural yang faktual mengenai penyusunan LRA dari sudut pandang pelaksana di lapangan, bukan hanya dari perspektif regulasi. Dengan menggunakan kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai alat analisis, penelitian ini mengidentifikasi letak gap antara prosedur ideal yang ditetapkan regulasi dengan kondisi aktual pelaksanaannya, serta memetakan sumber hambatan secara sistematis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi instansi dalam upaya penyempurnaan tata kelola pelaporan keuangan, sekaligus memperkaya literatur akademik mengenai implementasi akuntansi pemerintahan di tingkat operasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan".

1.2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul serta latar belakang penelitian, adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mendeskripsikan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Setditjen Penegakan Hukum Kehutanan.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Setditjen Gakkum Kehutanan.

1.3. Manfaat Penulisan

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi mengenai prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada instansi pemerintah serta menjadi bahan pembelajaran dalam bidang akuntansi sektor publik.
2. Manfaat Praktis, laporan ini dapat digunakan sebagai acuan oleh satuan kerja Gakkum Kehutanan untuk memahami prosedur penyusunan LRA

yang tepat dan sesuai aturan. Di sisi lain, hasil penulisan ini juga diharapkan mendorong SDM yang ada untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan tahapan sistematis yang digunakan sebagai pedoman dalam menjelaskan pendekatan penelitian, jenis data, serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung proses penyusunan tugas akhir ini. Tulisan ini didasarkan pada pengalaman langsung selama kegiatan praktik kerja lapangan di Gakkum Kehutanan, serta berdasarkan dokumen dan referensi yang relevan dengan topik yang diangkat.

1. Jenis data

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi langsung yang dilakukan penulis selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) wawancara secara langsung dengan staf yang menangani Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Gakkum Kehutanan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen LRA dan regulasi terkait yang berlaku, di antaranya PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP Nomor 2.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk Laporan Tugas Akhir ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan memperhatikan secara langsung melalui kegiatan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Gakkum Kehutanan. Wawancara dilakukan dengan staf bagian Akuntansi dan Keuangan yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan laporan. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen berkaitan yang tersedia dan mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah.

3. Metode Penulisan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Setditjen Gakkum Kehutanan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memberikan gambaran mengenai penulisan tugas akhir ini, penulisan ini mendeskripsikan pada setiap bagian bab. Di bawah ini adalah penjelasan singkat tentang sistematika penulisan tersebut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang dari pemilihan topik dan judul, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang definisi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Gakkum Kehutanan, serta peraturan yang didasarkan pada SAP yang berlaku.

Bab III Gambaran Umum Instansi. Bab ini memuat profil dari instansi, struktur, serta tugas dan fungsi instansi.

Bab IV Pembahasan. Bab ini menjelaskan tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Gakkum Kehutanan.

Bab V Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan observasi langsung dan data yang diperoleh dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Setditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Setditjen Gakkum Kementerian Kehutanan dilaksanakan melalui tujuh tahapan yang bersifat berurutan dan saling berkaitan, yaitu: (1) penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar otorisasi anggaran; (2) realisasi belanja melalui mekanisme SPP–SPM–SP2D; (3) realisasi pendapatan melalui sistem SIMPONI dan MPN G3; (4) pencatatan seluruh transaksi ke dalam sistem SAKTI; (5) rekonsiliasi bulanan antara satuan kerja dengan KPPN melalui e-Rekon & LK; (6) review dan validasi internal oleh pejabat berwenang serta Inspektorat Jenderal; dan (7) kompilasi serta penyampaian LRA konsolidasi eselon I kepada kementerian.

Penyusunan LRA di Setditjen Gakkum tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan proses ganda, yakni penyusunan LRA di tingkat satuan kerja sekaligus konsolidasi LRA eselon I yang mengompilasi seluruh laporan keuangan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Bagian Keuangan Setditjen Gakkum berperan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sekaligus Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1).

Berdasarkan analisis perbandingan antara prosedur normatif dengan kondisi aktual di lapangan, dua tahapan berstatus sesuai penuh, yaitu penetapan DIPA dan realisasi pendapatan melalui SIMPONI–MPN G3. Empat tahapan berstatus sebagian sesuai, meliputi realisasi belanja, pencatatan SAKTI, rekonsiliasi dengan KPPN, serta kompilasi dan penyampaian LRA. Satu tahapan, yakni review dan validasi oleh Inspektorat Jenderal, berstatus belum optimal akibat

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ketidakselarasan jadwal. Secara keseluruhan, kerangka prosedural yang berjalan telah mengikuti alur normatif yang ditetapkan regulasi, namun dinamika implementasi menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural formal tidak identik dengan pelaksanaan yang sepenuhnya bebas hambatan.

2. Hambatan dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penyusunan LRA, ditemukan lima kategori hambatan yang bersifat berlapis dan saling berkaitan. Pertama, hambatan teknis berupa selisih rekonsiliasi yang bersifat berulang setiap periode, mencakup selisih nilai nominal realisasi belanja, selisih realisasi pendapatan, serta kesalahan kode akun belanja dan pendapatan yang tidak konsisten dengan Bagan Akun Standar (BAS).

Kedua, hambatan teknis lanjutan berupa rigiditas rekonsiliasi yang harus dilakukan hingga ke level Chart of Account (COA) dan kode output program kegiatan yang dalam praktiknya dikenal sebagai fenomena shut-off code. Meskipun tuntutan ini memiliki justifikasi yang kuat karena LRA berfungsi ganda sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan sekaligus cerminan kinerja program, hal tersebut menimbulkan tekanan waktu yang signifikan dalam setiap siklus pelaporan.

Ketiga, hambatan administratif berupa keterbatasan kapasitas KPPN dalam memvalidasi kesesuaian substansi belanja dengan karakteristik kelembagaan kementerian. Kondisi ini menyebabkan transaksi yang tidak sesuai karakter kementerian dapat lolos verifikasi formal KPPN dan baru terdeteksi pada tahap validasi internal kementerian, sehingga harus dilakukan retifikasi (ralat akun) pasca-realisisasi yang menambah beban administratif.

Keempat, hambatan sumber daya manusia berupa keterbatasan kompetensi petugas operator General Ledger (GL) di tingkat satuan kerja, terutama dalam hal penyajian data realisasi dan pengungkapan bukti dukung yang sesuai ketentuan. Hambatan ini berdampak sistemik pada kualitas LRA konsolidasi eselon I karena menyebabkan Bagian Keuangan Setditjen Gakkum harus melakukan koreksi dan klarifikasi berulang sebelum data dapat diproses.

Kelima, hambatan koordinasi berupa ketidakselarasan antara jadwal penyelesaian rekonsiliasi dan tutup buku di Bagian Keuangan dengan jadwal permintaan *entry meeting review* Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kondisi ini menciptakan tekanan waktu yang tidak ideal bagi fungsi pengawasan intern yang seharusnya memberikan nilai tambah bagi kualitas laporan keuangan. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa gap terbesar dalam penyusunan LRA bukan bersumber dari kelemahan sistem teknologi SAKTI dan SIMPONI telah terbukti berfungsi dengan baik melainkan dari dua aspek yang bersifat manusiawi, yaitu keterbatasan kompetensi aparatur dan ketidakselarasan koordinasi jadwal antar lembaga

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan temuan penelitian di atas, penulis menyampaikan saran kepada dua pihak, yaitu instansi terkait dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Setditjen Gakkum Kementerian Kehutanan

Pertama, mengingat program peningkatan kompetensi operator GL secara nasional telah terintegrasi dengan pelatihan teknis Aplikasi SAKTI melalui jalur klasikal maupun non-klasikal sesuai Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018, Bagian Keuangan, SDM, Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Gakkum disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan mekanisme tersebut secara lebih konsisten dan terjadwal, khususnya melalui bimbingan teknis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran serta pendampingan langsung dari Bagian Keuangan eselon I yang disesuaikan dengan peran ganda Setditjen Gakkum selaku UAKPA sekaligus UAPPA-E1.

Kedua, perlu dibangun mekanisme validasi substansi belanja yang bersifat preventif di tingkat satuan kerja sebelum Surat Perintah Membayar diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Mekanisme ini dapat berupa daftar referensi kode akun yang sesuai karakteristik program Ditjen Gakkum dan prosedur pengecekan mandiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelum pencairan, guna menekan frekuensi retifikasi akun pasca-realisasi.

Ketiga, Bagian Keuangan Setditjen Gakkum disarankan melakukan koordinasi proaktif dengan Inspektorat Jenderal untuk menyepakati mekanisme penjadwalan reuview yang lebih responsif terhadap variasi durasi rekonsiliasi, sehingga permintaan entry meeting tidak menimbulkan tekanan kontraproduktif saat proses tutup buku baru selesai.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Keempat, Setditjen Gakkum disarankan menetapkan pedoman teknis internal yang mengatur jadwal penyampaian data laporan keuangan dari satuan kerja secara lebih terstruktur, mengingat kelancaran kompilasi Laporan Realisasi Anggaran konsolidasi sangat bergantung pada ketepatan waktu dan kelengkapan data yang diterima dari seluruh satuan kerja di bawahnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pertama, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berfokus pada satu unit kerja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan prosedur dan hambatan penyusunan LRA di beberapa satuan kerja eselon I atau instansi pemerintah yang berbeda, guna mengidentifikasi pola hambatan yang bersifat sistemik lintas instansi.

Kedua, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan pendekatan campuran (mixed methods) yang mengintegrasikan analisis kualitatif prosedural dengan pengukuran kuantitatif, seperti pengukuran tingkat ketepatan waktu pelaporan, tingkat selisih rekonsiliasi, atau korelasi antara kompetensi SDM dengan kualitas LRA yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur.

Ketiga, topik mengenai implementasi sistem SAKTI dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah masih relatif terbatas dalam literatur akademik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendalami aspek ini, termasuk kajian mengenai kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, dan mekanisme dukungan teknis dalam implementasi SAKTI di berbagai satuan kerja pemerintah pusat.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Miradji, M., Tara Iman Aisyah, R., Rangga Wijaya, R., Firdo Sihotang, A., & Nurul Laili Fitriah, I. (2025). Strategi Penyusunan Laporan Keuangan yang Efektif dan Transparan. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital*, 2(3), 31–44. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i3.598>
- Biduri, S. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Diterbitkan oleh UMSIDA PRESS* (S. B. Sartika & M. T. Multazam, Ed.). UMSIDA PRESS.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2026). *Standar Akuntansi Pemerintahan®*.
- Londo, C. W., Syaefudin, F. I. M., Pontorondo, I. C., & Rondonuwu, B. F. (2024). Analisis Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL AKUNTANSI VOKASI*, 8(2), 54–72. <https://jurnal.polimdo.ac.id/index.php/jav/article/view/1084>
- Ningsih, I., Lovisai, P., & Hanum, Z. (2023). TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (PUBLIC SECTOR ACCOUNTING THEORY). Dalam *Jurnal Bismar Info* (Vol. 10).
- Nuswantoro, M. A., & Rahmawati, E. (2025). Exploring financial reporting quality: Evidence from Indonesian local governments. *Journal of Accounting and Investment*, 26(3), 987–1009. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i3.27667>
- Oktavianity, N., Desyana, G., Kurniawan, R., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Tanjungpura, U. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Baran Menggunakan Konsep Value For Money. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(1), 1–7. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Legislation 8, BN.2025 (219)/16 hlm (2025).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti, BN.2021/NO. 1307; <https://jdih.kemenkeu.go.id> 1 (2021). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Legislation 217/PMK.05/2022, 217/PMK.05/2022 (2022).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Legislation 60, LN. 2008 No. 127, TLN No. 4890, LL SETNEG 1 (2008).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Legislation 71, LN. 2010 No. 123, TLN No. 5165, LL SETNEG 1 (2010).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Legislation 140, LN 2024 (250): 45 hlm.; jdih.setneg.go.id (2024).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, Legislation 175, LN 2024 (371): 23 hlm.; jdih.setneg.go.id 1 (2024).

Primardiningtyas, F., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pengelolaan Keuangan sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Pasuruan. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 9(1), 84–98. <https://doi.org/10.30738/ad.v9i1.19055>

Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 346–359. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>

Ratnasari, D. (2022). Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga: Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 91–101. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i2.101>

Rindengan, A. M. T., & Kapojos, P. M. (2024). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 288–298. <https://doi.org/10.58784/rapi.190>

Soleha, S., Afriani, T., & Muda, I. (2025). Analysis Of Budget Realization Reports On Financial Statements of the Personnel Agency North Sumatra Province in 2024. *International Journal of Economics, Finance and Banking Issues (IJEFB)*, 1(1), 54–61. <https://kalimasadajournals.com/>

Sonjaya, Y. (2024). Evolving Perspectives on Public Sector Accounting Practices. *Advances in Applied Accounting Research*, 2(2). <https://doi.org/10.60079/aaar.v2i2.175>

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Legislation 1, LN. 2004/ No. 5, TLN NO. 4355, LL SETNEG : 55 HLM (2004).

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Legislation 17, LN.2003/NO.47, TLN NO.4286, LL SETNEG : 20 HLM 1 (2003).

Utami, R. H. S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Maneksi*, 13(2), 265–273. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2200>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Well, R. (2026). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSA Pemerintahan No. 02 Tahun 2025 dalam Pengelolaan Anggaran Berdasarkan DIPA dan LAKIP di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2024. *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, 6(1), 4–14.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2026

Narasumber : Staff Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan

Pewawancara: Bagaimana proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan tahapan apa saja yang perlu dilalui di tingkat Sekretariat Jenderal?

Narasumber: Penyusunan LRA di tingkat Setditjen Gakkum Kementerian Kehutanan tidak bisa berjalan sendiri tanpa data dari satuan kerja di bawahnya. Ini karena seluruh komponen pendapatan dan belanja yang masuk ke LRA sudah lebih dulu tercantum dalam DIPA masing-masing satker. Jadi pada dasarnya LRA itu sepenuhnya bergantung pada bagaimana satker menjalankan anggarannya. Proses penyusunan LRA dimulai dari transaksi yang dilakukan oleh Satker yang memiliki DIPA. Di dalam dokumen itu, alokasi anggaran untuk belanja tercatat sebagai “pagu”, sedangkan estimasi pendapatan dicantumkan sebagai “estimasi”, keduanya tercantum dalam lampiran DIPA yang berbeda. DIPA sendiri terbentuk melalui proses perencanaan panjang mulai dari pengajuan pagu indikatif hingga akhirnya ditetapkan sebagai alokasi resmi dan dimasukkan ke SAKTI. Setelah DIPA turun, barulah realisasi anggaran bisa berjalan. Realisasi belanja dicatat berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN selaku Bendahara Umum Negara, sementara realisasi pendapatan berdasarkan SSPP. Semua transaksi ini kemudian diproses melalui modul-modul di SAKTI, mulai dari modul komitmen, modul pelaksanaan, hingga modul pelaporan. Di modul pelaporan inilah seluruh data realisasi dikompilasi dan disajikan menjadi LRA yang memuat estimasi, pagu, realisasi belanja, dan realisasi pendapatan secara terintegrasi. Seluruh prosesnya berjalan secara elektronik dengan mekanisme verifikasi dan validasi berlapis, sehingga ruang untuk manipulasi data menjadi sangat kecil. Untuk penyetoran pendapatan ke kas negara, prosesnya menggunakan SIMPONI dan MPN G3 yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara real-time melalui virtual account. Berbeda dengan Laporan Operasional yang mencerminkan aktivitas operasional, LRA secara khusus merekam seluruh arus kas masuk dan keluar dari kas negara, dan setiap transaksi di dalamnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Rekonsiliasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LRA pun punya karakteristik tersendiri karena mencakup komponen belanja, pendapatan, pagu, dan estimasi yang tidak bisa disamakan dengan rekonsiliasi pada laporan keuangan lainnya.

Pewawancara: Setelah LRA disusun, apakah ada mekanisme validasi atau reviu sebelum laporan disampaikan ke pihak eksternal?

Narasumber: Ada, dan prosesnya itu berlapis. Bahkan sebelum transaksi resmi tercatat sebagai realisasi di tingkat satker pun sudah ada verifikasi dan validasi yang harus dilalui. Jadi sejak tahap pencairan sampai terbentuknya satu transaksi realisasi, prosesnya sudah melewati banyak titik pemeriksaan. Setelah LRA satker terbentuk, ada lagi lapisan validasi saat data tersebut naik ke tingkat Setditjen Gakkum. Di sinilah kami memastikan apakah realisasi anggaran dari satker benar-benar sesuai dengan karakteristik belanja di lingkungan Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan. Misalnya, kalau tiba-tiba ada kode belanja gratifikasi yang lolos dari satker dan bahkan sempat dicairkan oleh KPPN karena secara formal dokumennya terpenuhi, di tingkat Setditjen Gakkum kami akan mempertanyakan itu. Apakah belanja gratifikasi memang relevan di lingkungan Kementerian Kehutanan? Kalau tidak, maka perlu dilakukan ralat atau retifikasi akun. Itulah fungsi validasi di tingkat atas satker, memastikan substansi belanjanya benar-benar sesuai, bukan hanya formalitasnya.

Pewawancara: Apa saja bentuk kompleksitas yang sering dihadapi dalam proses penyusunan LRA di lingkungan Setditjen Gakkum Kementerian Kehutanan?

Narasumber: Kompleksitas utamanya ada di proses verifikasi dan validasi yang memang cukup ketat. Rekonsiliasi misalnya, itu bukan sekadar mencocokkan nilai. Hampir di setiap siklus pelaporan pasti ada selisih rekon belanja, selisih rekon pendapatan, atau kesalahan kode akun. Dan rekonsiliasi yang dilakukan itu bisa sangat detail, bukan hanya soal apakah nilainya cocok atau tidak, tapi juga apakah kode akunnya benar. Contohnya, ada satker yang mencatat pendapatan sewa tanah dan bangunan tapi kode akunnya berbeda dengan yang seharusnya. Nilainya mungkin sama persis, tapi kalau kode akunnya beda, tetap tidak bisa lolos rekonsiliasi. Bahkan rekonsiliasi bisa sampai ke level COA, dan dalam beberapa kasus sampai ke kode output dan kode program kegiatan. Kenapa harus sedetail itu?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Karena LRA itu sebetulnya bukan hanya laporan keuangan, dia juga mencerminkan kinerja dan output yang dihasilkan dari setiap belanja. Kalau realisasi belanja tidak sesuai dengan kode output yang tepat, laporan jadi bias. Misalnya ada belanja yang seharusnya untuk kegiatan patroli penegakan hukum hutan tapi tercatat sebagai belanja jasa umum, itu outputnya jadi tidak terbaca dengan benar. Makanya kecocokan kode output itu juga penting, bukan hanya nilai dan akunnya.

Pewawancara: Bagaimana Setditjen Gakkum memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan program?

Narasumber: Peran kami di Setditjen Gakkum pada dasarnya adalah mendukung program-program utama Ditjen Gakkum di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan. Dukungan itu kami berikan dalam bentuk manajemen dan pengawalan pertanggungjawaban keuangan. Kami tidak membatasi kegiatan di lapangan. Program penegakan hukum dan perlindungan hutan tetap berjalan. Yang kami kawal adalah bagaimana pertanggungjawabannya, apakah sudah sesuai dengan kaidah akuntansi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan keuangan kami dorong untuk mengikuti prinsip-prinsip good governance agar setiap rupiah yang disalurkan melalui DIPA bisa dipertanggungjawabkan dengan baik sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah yang pada akhirnya muaranya adalah ke masyarakat. Soal opini WTP, itu kami anggap sebagai bonus, bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah memastikan pengelolaan keuangannya benar, dampaknya nyata, dan kepercayaan publik terjaga. Kalau keuangan dikelola dengan baik dan transparan, opini yang baik akan mengikuti dengan sendirinya. Itulah tanggung jawab besar yang kami emban di Setditjen Gakkum Kementerian Kehutanan.

Lampiran 2 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Lisnawati, S.E., M. Tr.E.

NIP : 19970432024062001

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNU menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan laporan tugas akhir/ skripsi untuk:

Nama : Robbi Rizki Samboja

NIM : 2304321040

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan.
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan tugas akhir sesuai dengan kalender akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugas tersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Depok, 15 Juli 2024

Pembuat pernyataan,



Rika Lisnawati, S.E., M. Tr.E.
NIP. 19970432024062001

Lampiran 3 Lembar Bimbingan Tugas Akhir

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lembar Bimbingan

NIM Nama : 2304321040 / Rikka Risha Sembaga
 Program Studi : D3 Keperawatan dan Rehabilitasi
 Nama Dosen Pembimbing : Rika Liana, S.E., M. Tr.E.
 Pembimbing ke :

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
11 Januari 2024	Pengajuan dan pengajuan laporan	Rika
25 Januari 2024	Revisi BAB 1 latar belakang	Rika
4 Februari 2024	Revisi BAB 1 tujuan dan manfaat	Rika
20 April 2024	Revisi BAB 2 tinjauan pustaka	Rika
12 Mei 2024	Revisi BAB 2 tinjauan pustaka dan BAB 3 gambaran umum rumah sakit	Rika
22 Mei 2024	Revisi BAB 4, 2, 3	Rika
31 Mei 2024	Revisi BAB 4 penutup dan kesimpulan	Rika

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lembar Bimbingan

NIM Nama : 2304321040 / Roke Rizki Sambaja
 Program Studi : D3 Keperawatan dan Perawatan
 Nama Dosen Pembimbing : Rika Lestari, S.E., M.Tr. E.
 Pembimbing ke :

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
6 Juni 2026	BAB 4 pembahasan	Rika
7 Juni 2026	REVISI BAB 4 pembahasan	Rika
8 Juni 2026	ACC	Rika

Lampiran 4 Surat Pernyataan Penggunaan Generative AI

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DALAM TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama: Robbi Rizki Samboja
- NIM: 2304321040
- Program Studi: D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
- Judul Tugas Akhir: PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2025 PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN

Menyatakan dengan sebenarnya terkait penggunaan alat *Generative AI* (seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dll) dalam penyusunan tugas ini:

A. Status Penggunaan (Pilih salah satu):

- ☐ **Tidak Menggunakan AI:** Saya tidak menggunakan alat AI generatif dalam bagian mana pun dari tugas ini.
- ☒ **Menggunakan AI secara Terbatas:** Saya menggunakan AI hanya untuk tujuan pendukung (seperti perbaikan tata bahasa, pencarian ide, atau struktur outline).
- ☐ **Menggunakan AI secara Signifikan:** Saya menggunakan AI untuk menghasilkan sebagian konten dengan verifikasi dan pengolahan kembali oleh saya sendiri.

B. Rincian Penggunaan (Jika menggunakan): Jika Anda mencentang opsi penggunaan AI, jelaskan bagian mana yang dibantu oleh AI dan bagaimana Anda memverifikasinya:

Artificial Intelligence Disclosure (AID) Statement:

Artificial Intelligence Tool: [Claude, Chat GPT]; **[Heading]:** [Membantu dalam pencarian ide dan Struktur Laporan]; **[Human Verifications]:** (Saya menggandakan AI untuk menerjemahkan dan mengelaborasi lebih jauh ide saya dan masukkan dari dosen, saya juga menggunakan ai untuk memperhalus tujuan penulisan laporan saya).

C. Pernyataan Integritas: Saya menyadari bahwa penggunaan AI tanpa deklarasi yang jujur atau penggunaan AI untuk menggantikan proses berpikir kritis saya sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran etika akademik/plagiarisme. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh isi tugas ini.

Depok, 26 Juni 2026

Mahasiswa,



Robbi Rizki Samboja



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK SIDANG TUGAS AKHIR

Pada tanggal 26/06/2026 tugas akhir yang disusun oleh:

Nama : Robbi Rizki Samboja
 NIM : 2304321040
 Judul : Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
 pada Sekretariat Direktorat Penegakan Hukum Kementerian
 Kehutanan

Telah disetujui untuk diteruskan ke tahap sidang akhir sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Rika Lisnawati, S.E., M.Tr.F.
 NIP. 19970432024062001

Diketahui Oleh:

KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Hoti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
 NIP : 199004252024062002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PEMBIMBING

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama Mahasiswa | : Robbi Rizki Samboja |
| 2. NIM | : 2304321040 |
| 3. Program Studi | : D3 Keuangan dan Perbankan |
| 4. Judul Tugas Akhir | : Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan |
| 5. Dosen Pembimbing | : Rika Lisnawati, S.E., M. Tr.E. |

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	Bab 4: Halaman 40 berikan penjelasan tabel 4.3 yang di bagian akhir	Revisi bab 4 sudah diperbaiki	ACC
2	Perbaiki spasi pada semua subbab	Spasi sudah diperbaiki	ACC
3	Setiap tabel spasi 1. Sama huruf 10	Sering tabel sudah diubah ke spasi 1 dan font	ACC
4	Pada setiap tabel yang terpisah diberikan judul	Sesuai tabel yang terpisah sudah diberikan	ACC
5			

Catatan: (1) Revisi diisi Dosen Pembimbing; (2) Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki; (3) Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai.

Depok, 30 Juni 2026
Dosen Pembimbing

Rika
Rika Lisnawati, S.E., M. Tr.E.
NIP. 19970432024062001

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hujung
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: lumas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PENGUJI

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama Mahasiswa | : Robbi Rizki Samboja |
| 2. NIM | : 2304321040 |
| 3. Program Studi | : D3 Keuangan dan Perbankan |
| 4. Judul Tugas Akhir | : Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Kementerian Kehutanan |
| 5. Dosen Penguji | : Novitasari, S.Pd., M.Ak |

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1.	Halaman cover disesuaikan "Bahan Pembelajaran Departemen III"	"Bahan Pembelajaran Departemen III" dihapus	Acc
2.	Menurut laporan, mahasiswa harus dan menggunakan dan ditulis dengan menggunakan singkatan asing	Mengikuti aturan ditambahkan agar lebih sesuai	Acc
3.	Kata menggunakan kata-kata yang dapat terdapat LRA	Dibersihkan kata-kata ditambahkan	Acc
4.	Subbab 2.3.1 sampai 2.3.5 ditambah sifat	Subbab tersebut sudah ditambahkan	Acc
5.	Tambahkan penjelasan solusi dari hambatan penelitian	Lampiran penelitian yang ditambahkan dan ditambahkan	Acc
6.	Singkatan bagian surat yang terlalu panjang	Singkatan disingkat untuk bagian surat	Acc
7.	Tambahkan gambar yg berkaitan dengan SAUK	Ukiran awal gambar ditambahkan	Acc

Catatan: (1) Revisi diisi Dosen Pembimbing.; (2) Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki.; (3) Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai.

Depok,
Dosen Penguji

Novitasari, S.Pd., M.Ak
NIP.

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi